

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

Bidang Fokus : Bidang X

USULAN PENELITIAN DOSEN



**ANALISIS PENGARUH SEKTOR BASIS DAN NON BASIS
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI**

TIM PENGUSUL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2021

DAFTAR PUSTAKA

Table of Contents

BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Urgensi Penelitian	12
BAB II. LANDASAN TEORI.....	13
2.1. Teori Basis Ekonomi	13
2.2. Teori Lokasi.....	14
2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	16
BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Metode Penelitian	27
3.2. Alat Analisis	27
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	30
4.1. Anggaran Biaya	30
4.2. Jadwal Penelitian	30

Ringkasan

Dalam penelitian ini akan menganalisis sektor basis dan sektor non basis dalam kerangka PDRB di Provinsi Jambi dan melakukan analisis secara lebih mendalam terkait pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Jambi dan dokumen dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model LQ dan regresi linier berganda. Luaran hasil dari penelitian ini direncanakan akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi sinta 4.

Kata Kunci; sektor basis, sektor non basis, pertumbuhan ekonomi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dewasa ini, era globalisasi mendorong aktivitas ekonomi maju berkembang tanpa batas. Transaksi ekonomi yang terjadi tidak terjadi hanya dalam skala daerah, nasional bahkan sampai internasional. Menyikapi semua itu, konteks pertumbuhan ekonomi tidak bisa dikesampingkan dari semua itu dan tentunya pembangunan ekonomi sangat juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dimana keduanya mempunyai kaitan yang erat. Pertumbuhan ekonomi sendiri proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional maupun riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil yang konstan dan meningkat dari tahun ke tahun. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah terjadi apabila ada kenaikan output pendapatan perkapita dan menggambarkan kenaikan taraf hidup masyarakat diukur dengan output riil per orang maupun masyarakat.

Menurut (Soekirno, 2003) “Pertumbuhan ekonomi (economic growth) bergantung dari pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional”. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Sangat mengingat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur penilaian

pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, dan sudah masuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi tersebut. Disini Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki arti dan definisi yang sangat berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional. Sedangkan Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen menjadi sektor-sektor penopang. Adapun salah satu faktor juga dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Dalam menyusun pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama. Menurut Restiatun (2009), “Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang”. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran kinerja dalam melakukan pembangunan.

Sejalan dengan Restiatun, Menurut BPS (2010) “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB dapat dikategorikan dalam berberbagai sektor ekonomi yaitu: Pertanian; Pertambangan dan penggalan; Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; persewaan dan jasa perusahaan; jasa lainnya”. Menurut data PDRB yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2020 fluktuatif dimana yang tertinggi terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 7,86% dan yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu -0,46% karena adanya pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2010-2020 namun dalam nilai riil PDRB Provinsi Jambi nilainya terus meningkat

hal ini bisa terjadi dikarenakan sektor-sektor lain yang pertumbuhannya meningkat dan saling menutupi antar satu sama lain.

Tabel 1. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jambi Tahun 2020

Sektor	Rp (milyar)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.757,90
B. Pertambangan dan Penggalan	34.928,50
C. Industri Pengolahan	15.564,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	81,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	202,68
F. Konstruksi	11.140,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.203,50
H. Transportasi dan Pergudangan	4.185,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.584,31
J. Informasi dan Komunikasi	6.101,01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.487,26
L. Real Estate	2.201,89
M.N. Jasa Perusahaan	1.473,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.019,68
P. Jasa Pendidikan	5.127,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.898,47
R.S.T.U. Jasa lainnya	1.491,38
Total PDRB	148.449,87

Sumber : BPS Provinsi Jambi .

Pada tahun 2020, sector pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 26,8%. Sektor pertanian yang terus menerus memberikan kontribusi terbesar dikarenakan meningkatnya perhatian di sektor pertanian menunjang peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi sebagai upaya meningkatkan pembangunan daerah mengingat sektor pertanian menjadi sector unggulan di Provinsi Jambi. selain itu meningkatkan regulasi mengenai pengendalian alih fungsi lahan mengingat alih

fungsi lahan menjadi faktor yang krusial yang mempengaruhi perubahan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Selanjutnya kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 23,5%. Setidaknya ada beberapa alasan yang menjadikan sektor ini penting yaitu dimana Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga penguasaan terhadap Iptek mutakhir masih cenderung tertinggal serta adanya keterbatasan dalam segi modal dan masih belum memiliki keunggulan komparatif pada sektor ekonomi yang berbasis IPTEK dan padat modal sehingga titik berat perekonomian lebih pada sektor ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan padat tenaga kerja. Sehingga sektor perekonomian di Provinsi Jambi yang memenuhi syarat tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalan. Dari segi sektoral nilai PDRB tertinggi tahun 2020 di sektor-sektor yang berbasis sumberdaya alam di Provinsi Jambi seperti pertanian, perikanan maupun kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi mengalami fluktuatif dari tahun 2010-2020 hal ini dipicu dari faktor-faktor kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB yang menjadi penopang seperti sektor` pertanian kehutanan dan perikanan maupun sector administrasi pemerintahan yang terus meningkat dan sektor-sektor ekonomi lain yang menjadi penopang juga memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi. Tentunya akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi kedepannya.

Menurut Richardson (Tarigan, 2005) “suatu daerah atau wilayah harus mampu membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung dengan cara

mensinergikan sektor-sektor ekonomi. Sehingga pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor yang dimaksud disini adalah sektor basis dan non basis, Teori basis ekonomi mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat eksogen (tidak tergantung pada kekuatan internal/permintaan lokal. Sedangkan kegiatan nonbasis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, oleh karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat". Menurut Rustiadi, dkk (2011) "Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya, Nilai strategis setiap sector didalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda meliputi sektor-sektor yang ada antara lain, sektor potensial adalah sektor yang mempunyai potensi untuk dapat menjadi sektor basis di suatu wilayah, lebih lanjut Rustiadi dkk menjelaskan, sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah, artinya sektor basis ini yang akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah/wilayah dan sektor non-

basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang.” Provinsi Jambi sendiri memiliki sektor-sektor ekonomi penopang daerah, baik di sektor basis maupun sektor non basis yang antar sektor satu dengan sektor yang lain memiliki potensi untuk menjadi sektor utama daerah serta tentunya pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif menjadi pertimbangan sektor-sektor tersebut memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, perlu diadakan penelitian untuk mengetahui apakah pengaruh sektor basis dan pengaruh sektor non basis, dan pengaruh kedua sector tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dengan demikian peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka akan timbul pertanyaan penelitian yaitu apakah ada pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2010-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

1.4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melalui penelitian ini permasalahan yang menjadi daya unkit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat di dapat sebagai informasinya sehingga memudahkan para pemangku kebijakan dalam pengembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. di samping itu penelitian dengan topik ini juga cukup lama di tinggalkan oleh para peneliti sehingga perlu di lakukan penelitian ini untuk melihat dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan sektor basis dan non basis.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Basis Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan basis (Basis activities) adalah kegiatan mengeksport barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (non basis activities) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. (Mangun, 2007).

Analisis sektor basis ini umumnya didasarkan pada nilai tambah (pendapatan) atau pun lapangan kerja. Terdapat beberapa cara dalam memilah antara kegiatan basis dan non basis, yaitu antara lain dengan metode langsung, metode tidak langsung, metode campuran dan metode Location Quotion (Tarigan, 2004). Menurut tarigan (2004), metode langsung dapat dilakukan dengan survey langsung kepelaku usaha darimana mereka memperoleh barang-barang kebutuhan untuk memproduksi barang dan kemana mereka memasarkan barang-barang tersebut. Metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual keluar wilayah langsung dianggap sector basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan local langsung dianggap non basis. Adapun metode campuran adalah dengan menggunakan data sekunder sebagai survey pendahuluan. Baru kemudian dilakukan survey langsung terhadap sektor-sektor yang dianggap perlu. Sedangkan metode LQ adalah dengan

membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah suatu wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sector yang sama secara nasional. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunny permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977)

2.2. Teori Lokasi

Permasalahan pemilihan lokasi dalam setiap kegiatan pembangunan baik regional maupun nasional merupakan hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan secara matang agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara produktif dan cukup efisien. Karenanya telah cukup banyak ahli ekonomi yang membahas tentang teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun social (Tarigan, 2004:122).

Diantara sekian banyak teori lokasi yang diperkenalkan para ahli, diantaranya ada beberapa teori yang paling populer antara lain teori Von Thunen (1826) dan A.Weber (1909). Menurut Thunen (1826), jenis pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh tingkat sewa lahan dan didasarkan pula pada aksesibilitas relatif.

Lokasi berbagai produksi pertanian ditentukan oleh kaitan antara harga pasar dan jarak antara daerah produksi dan pasar penjualan. Sedangkan Weber (1909) lebih menekankan pentingnya biaya transportasi sebagai faktor pertimbangan lokasi (Adisasmita, 2005:42). Setelah Thunen dan Weber, muncul pula beberapa ahli ekonomi yang turut mengembangkan teori lokasi seperti W.Christaller (1933), A.Losch (1944) F.Perroux (1955) W.Isard (1956) dan J. Friedmann (1964) yang pada umumnya mengkaitkan teori lokasi mereka dengan sumber bahan mentah dan lokasi pasarnya. Dengan kriteria penentuan yang bermacam macam, antara lain biaya transpormasi yang terendah, sumber tenaga kerja yang relative murah, ketersediaan sumberdaya air, energy atau pun daya tarik lainnya berupa penghematan lokasional dan keuntungan aglomerasi (Adisasmita.2005:45). Menurut tarigan (2004:150) tidak ada suatu teori tunggal yang bias menetapkan dimana lokasi suatu kegiatan produski itu sebaiknya dipilih.

Dalam Era globalisasi, pemilihan lokasi berarti pertama-tama memilih dinegara mana lokasi usaha tersebut lebih menguntungkan. Selanjutnya memilih provinsi dan kabupaten kota, tempat usaha tersebut akan dijalankan.Selain kriteria-kriteria umum diatas, faktor stabilitas politik merupakan pertimbangan penting bagi investor. Mereka lebih memilih kelangsungan usaha dalam jangka panjang daripada laba besar tapi tidak ada kepastian berusaha dalam jangka panjang.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistic PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Nilai tambah yang dihasilkan atau seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan terdiri dari perkalian dua faktor yaitu : (i) volume tambah yang dihasilkan atau seluruh volume barang dan jasa akhir yang dihasilkan, dan (ii) harga barang dan jasa yang dinilai. Nilai tambah yang dihasilkan atau seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan itu diperoleh dari kegiatan produksi atau dalam definisi itu disebut sebagai “unit ekonomi”. Karena PDRB ini merupakan pendapatan agregat (menyeluruh) dari suatu wilayah tertentu, maka unit ekonomi yang menghasilkan nilai tambah atau barang dan akhir itu adalah “seluruh unit-unit ekonomi” yang ada di suatu wilayah tertentu itu. Jadi bukan nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir satu atau dua unit ekonomi bahkan bukan hanya satu atau dua industri tertentu misalnya pertanian atau industri pengolahan, tetapi meliputi semua kegiatan produksi atau unit-unit ekonomi dari berbagai jenis industry yang ada di wilayah tertentu tersebut.

Jadi makna “seluruh unit ekonomi” merupakan semua unit-unit ekonomi di suatu wilayah / Daerah tertentu, dimana unit-unit ekonomi itu dikelompokkan dalam sektor atau sub sektor – sub sektor ekonomi (lapangan usaha). Pengelompokan sektoral ekonomi itu kadang menjadi 3 sektor, 9 sektor atau 17 sektor tergantung konsepsi sektoral ekonomi yang digunakan atau berlaku dimasing-masing Negara/ daerah maupun dalam skala internasional. Sebagai contoh PDRB dengan penyajian 9 (Sembilan) Unit Produksi atau 9 Lapangan Usaha adalah meliputi:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah.

Penyajian 9 (Sembilan) Sektor Lapangan Usaha atau Sektor Produksi/ Ekonomi tersebut kadang masih diperinci lagi masing-masing ke dalam sub sector-sub sector, sehingga secara rinci PDRD itu terdiri:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; dengan sub sector produksi:
 - a. Tanaman Bahan Makanan;
 - b. Tanaman Perkebunan;
 - c. Peternakan dan Hasil-hasilnya;
 - d. Kehutanan;
 - e. Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian; dengan sub sector produksi:
 - a. Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Pertambangan Tanpa Migas;
 - c. Penggalian.
3. Industri Pengolahan; dengan sub sector produksi :
 - a. Industri Migas;

- b. Industri Non Migas, yang terdiri dari:
 - 1) Makanan, Minuman dan Tembakau;
 - 2) Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki;
 - 3) Barang Kayu dan Hasil Hutan Lain;
 - 4) Kertas dan Barang Cetak;
 - 5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet;
 - 6) Semen dan Barang Lain Bukan Logam;
 - 7) Logam Dasar Besi dan Baja;
 - 8) Alat Angkut, Mesin dan Peralatan;
 - 9) Barang Lainnya.
- 4. Listrik, Gas dan Air Bersih; dengan sub sector produksi :
 - a. Listrik;
 - b. Air Bersih.
- 5. Konstruksi;
- 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; dengan sub sector produksi :
 - a. Perdagangan Besar dan Eceran;
 - b. Hotel;
 - c. Restoran.
- 7. Pengangkutan dan Komunikasi; dengan sub sector produksi :
 - a. Pengangkutan, yang terdiri dari :
 - 1) Angkutan Rel;
 - 2) Angkutan Jalan Raya;
 - 3) Angkutan Laut;
 - 4) Angkutan Udara;
 - 5) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - 6) Jasa Penunjang Angkutan.
 - b. Komunikasi, yang terdiri dari :
 - 1) Pos dan Giro;
 - 2) Telekomunikasi;
 - 3) Jasa Telekomunikasi.
- 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dengan sub sector produksi:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank;
 - c. Jasa Penunjang Keuangan;
 - d. Sewa Bangunan;
 - e. Jasa Perusahaan.
- 9. Jasa-jasa, dengan sub sector produksi :
 - a. Pemerintahan Umum;
 - b. Swasta; yang terdiri dari :
 - 1) Sosial Kemasyarakatan;
 - 2) Hiburan dan Rekreasi;
 - 3) Perorangan dan Rumahtangga.

Klasifikasi PDRB di atas merupakan Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) dimana klasifikasi lapangan usaha didasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990). Pengklasifikasian tersebut mengalami perubahan seiring dengan perubahan penggunaan tahun dasar yang baru dimana semula tahun dasar 2000 berubah menjadi tahun dasar 2010. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan dasar KBLI 2009. Dengan demikian PDRB dengan tahun dasar 2010 yang digunakan untuk penyajian data PDRD tahun 2010 ke depan menggunakan 17 (tujuh belas) lapangan usaha berdasar KBLI 2009 dengan sector ekonomi/ lapangan usaha sebagai berikut:

- A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- B. Pertambangan dan Penggalian;
- C. Industri Pengolahan;
- D. Pengadaan Listrik dan Gas;
- E. Pengadaan Air;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- H. Transportasi dan Pergudangan;
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- J. Informasi dan Komunikasi;
- K. Jasa Keuangan;
- L. Real Estate;
- M, N. Jasa Perusahaan;
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
- P. Jasa Pendidikan;
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Data PDRB dapat disajikan dalam tahun tertentu untuk PDRB beberapa atau banyak daerah kabupaten/ kota misalnya kabupaten/kota dalam satu wilayah Provinsi atau wilayah Eks Karesidenan tertentu. Penyajian data PDRB seperti itu

berarti penyajian data yang bersifat cross section (waktu tahun tertentu untuk banyak daerah/ wilayah). Penyajian data PDRB antar kabupaten/ kota ini untuk menggambarkan daerah/wilayah mana yang lebih besar/ lebih kecil dibandingkan daerah lainnya (dlilihat dari indicator besaran PDRB).

Namun ada juga penyajian data PDRB ini meliputi kurun waktu tertentu pada satu wilayah daerah saja. Penyajian data PDRB ini berarti penyajian data yang bersifat time series (dataurut waktu). Selanjutnya untuk kepentingan analisis data, biasanya untuk mengatasi keterbatasan data, kedua modal penyajian data itu digabungkan sehingga data yang didapatkan memiliki rentang tahun tertentu (time siriess) dengan jumlah kabupaten/ kota tertentu (cross section). Gabungan data time series (rentang waktu) dan cross section itu disebut penyajian data yang bersifat panel atau data pooling.

Penyajian PDRB : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Salah satu factor pengali PDRB selain volume adalah faktor harga barang atau jasa. Maka berdasarkan factor harga barang atau jasa ini terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu: (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Dengan demikian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menggambarkan perkembangan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) menggambarkan pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, misalnya tahun yang berakhir dengan angka 3, seperti tahun 1993, 1983 dan seterusnya atau tahun dasar 2000. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sering juga disebut sebagai PDRB Nominal, dimana harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada periode penghitungan. Data PDRB ADHB ini biasanya ditujukan untuk melihat struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB ADHK sering disebut sebagai PDRB Riil, dimana harga yang digunakan adalah harga pada tahun dasar tertentu. Data PDRB ADHK ini biasanya ditujukan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi daerah yang dapat mengidentifikasi kondisi dan perkembangan perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Dengan adanya data PDRB, akan dapat diambil manfaat antara lain:

1. PDRB ADHB atau PDRB Nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB suatu daerah yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi daerah tersebut juga besar, dan sebaliknya nilai PDRB suatu daerah yang lebih kecil menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi daerah tersebut juga cenderung lebih kecil.
2. PDRB ADHK atau PDRB Riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector/lapangan usaha dari tahun ke tahun. Jadi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

dihitung berdasarkan data PDRB ADHK atau PDRB Riil, yaitu perubahan dari tahun ke tahun PDRB ADHK tersebut.

3. Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha atau lebih tepatnya lagi adalah menurut kelompok lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau kontribusi/ sumbangan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah. Sektor-sektor/ Lapangan Usaha yang mendominasi perekonomian daerah menunjukkan bahwa sector/ lapangan usaha itu merupakan basis perekonomian wilayah yang bersangkutan.
4. PDRB Perkapita ADHB yaitu PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah menunjukkan nilai PDRB ADHB per satu orang penduduk. PDRB Perkapita ADHK ini dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
5. PDRB Perkapita ADHK yaitu PDRB ADHK dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah menunjukkan nilai PDRB ADHK per satu orang penduduk. Data PDRB Perkapita ADHK ini dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil (nyata) ekonomi perkapita suatu wilayah.

Pemilihan tahun untuk menjadi tahun dasar dalam perhitungan PDRB memiliki argumentasi tertentu, terutama adalah masalah stabilitas harga atau stabilitas perekonomian. Tahun yang dipilih menjadi tahun dasar itu bukan tahun yang mengalami gejolak harga atau gejolak perekonomian, namun tahun dimana kondisi perekonomian dalam keadaan stabil, perkembangan harga-harga (inflasi) terkendali, perekonomian menjadi kondusif bagi dunia usaha dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, kondisi perekonomian suatu negara tidak terus menerus dalam

keadaan stabil apalagi pada kondisi perekonomian dengan pasar lebih terbuka dan globalisasi semakin meluas, perubahan yang terjadi pada tatanan global akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu Negara tidak terkecuali hal itu untuk Indonesia.

Pada masa orde baru sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997-1998, tahun dasar yang digunakan disepakati menggunakan tahun yang berakhiran dengan 3, misalnya tahun 1973, 1983, dan 1993. Namun setelah terjadi krisis tahun 1997-1998, tahun dasar yang digunakan diubah menjadi tahun 2000 dengan alasan tahun 2000 perekonomian sudah mulai kembali stabil akibat keberhasilan program-program pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selama decade terakhir ini, banyak perubahan yang terjadi baik konstelasi perekonomian secara global, nasional, regional maupun local. Krisis finansial secara global yang terjadi pada tahun 2008, implementasi system perdagangan bebas (free trade) antara CHINA – ASEAN (CAFTA), perubahan system pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh-contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistic di seluruh Indonesia.

Salah satu bentuk penyesuaian pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar pencatatan PDB tersebut seiring dengan adanya rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar atas data PDB ini dilakukan secara

bersamaan dengan penghitungan PDRB provinsi maupun kabupaten/ kota dalam rangka menjaga konsistensi hasil penghitungan. SNA2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu dalam PDRB. SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan difaham

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain akan bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi tentang kondisi dan perkembangan perekonomian regional/ daerah yang paling baru (terkini), menyangkut pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian daerah;
2. Meningkatkan kualitas data PDRB, karena dengan tahun dasar PDRB yang baru, kualitas data PDRB lebih sesuai dengan kondisi perekonomian yang berkembang saat ini;
3. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional, karena dengan menggunakan standar pencatatan yang diakui secara internasional maka data PDRB dapat diperbandingkan dengan data-data PDRB di Negara-negara lain.

Perubahan harga tahun dasar seperti dari harga tahun dasar 2000 menjadi harga tahun dasar 2010 akan memberikan beberapa pengaruh antara lain :

1. Meningkatkan nominal PDRB yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan kemungkinan terjadinya pergeseran struktur perekonomian;
2. Dampak ikutan dari perubahan nominal PDRB tentu akan merubah juga besaran indikator makro ekonomi regional misalnya rasio upaya pajak (tax effort), rasio hutang terhadap PDRB, rasio investasi dan tabungan terhadap PDRB, struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Demikian pula dengan adanya perubahan nominal PDRB dan indikator makro ekonomi regional ikutan lainnya akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling dan forecasting serta analisis- analisis statistic lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini telah melakukan beberapa kali perubahan tahun dasar secara berkala atau kurang lebih sudah 5 kali yaitu tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Perubahan terakhir dari tahun dasar 2000 menjadi 2010 ini memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 cenderung relative stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 tahun atau 10 tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index = PPI);
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis yang melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memamparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

3.2. Alat Analisis

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis permasalahan adalah dengan menggunakan teknik analisis LQ (Location Quotient) yaitu salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang di gunakan untuk menganalisis sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah dengan membandingkan peranan sektor tersebut dalam peekonomian suatu daerah di Provinsi Jambi dengan sektor lain dalam perekonomian nasional.

Dengan rumus menurut Bendavid – Val sebagai berikut :

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- LQ = Koefisien Location Quotion
- E_{ij} = PDRB sektor I diwilayah studi
- E_j = Total PDRB di wilayah studi
- E_{in} = PDRB sektor i diwilayah referensi

En = Total PDRB diwilayah referensi

Hasil perhitungan LQ dapat digunakan untuk mengidentifikasi mana yang termasuk sektor unggulan dan mana yang bukan unggulan, yaitu :

1. Bila $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut tergolong sektor ekonomi unggulan. Artinya sektor tersebut prospektif (menguntungkan) untuk dikembangkan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi permintaan baik pasar lokal, regional atau nasional.
2. Bila $LQ < 1$ memberikan indikasi sektor tersebut bukan termasuk sektor unggulan, yang berarti sektor tersebut kurang prospektif untuk dikembangkan dan ada kecenderungan justru memerlukan pemenuhan permintaan dari daerah lain.
3. Bila $LQ = 1$ memberikan indikasi sektor tersebut sama setingkat dengan sektor yang sama pada wilayah setingkat lebih luas.

Selanjutnya untuk mencari pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi maka menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS seri 21.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independent terhadap variabel dependent. Dimana dalam penelitian ini, sektor basis (X_1) dan sector non basis (X_2) sebagai variabel independent (variabel bebas), akan dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependent (variabel terikat), berdasarkan model dasar dapat diformulasikan menjadi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX_i \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi
A = konstanta
B = koefisien regresi
X = PDRB sector basis/sector non basis

Dimana untuk penelitian ini, rumus regresi menggunakan log sehingga rumus regresi menjadi sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan ekonomi (persen)
X₁ = Laju Pertumbuhan Sektor Basis (persen)
X₂ = Laju Pertumbuhan Sektor Non Basis (persen)
Log = Logaritma
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
e = Standar error

BAB IV.BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Transportasi	250.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai	400.000,-
3	Konsumsi	250.000,-
4	Penerbitan Jurnal	600.000,-
Jumlah		1.500.000,-

4.2. Jadwal Penelitian

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2011. Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi daerah Edisi kedua, Yogyakarta.BPFE
- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi., Yogyakarta, BPFE-UGM
- Firdausi. 2012. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Aceh Barat. Banda Aceh. Tesis S2PPS.Unsyiah
- Hilmi, Didi Fuad, Abubakar Hamzah² , Sofyan Syahnur³. 2014. Analisis Sektor Basis Kabupaten Kota Dan Pusat Pengembangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0172 Pages pp. 50- 61 Volume 2, No. 2, Mei 2014.
- Mangun, N. 2007. Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah . Semarang. Tesis S2. Pps. Undip
- Prasetyo. S. 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (eksport) Posisi Dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alatalat Analisis Regional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
- Rustiadi, Ernan, Dkk.(2011). “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat. Sadono Sukirno. (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LPEF-UI Bima Grafika
- Rusli, Aditia Nugraha, Angelalia Roza^{2,*}, Andi Mulya Rusli³. 2021. Analisis Sektor Basis dan Sektor Non-Basis dalam Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan di Kota Padang Analysis of Basic and Non-Basic Sectors as Efforts to Improve the Urban Facilities and Infrastructure in Padang. Volume 21 Nomor 01, April 2021 : 45-52 45
- Sambodo, (2002). “Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Barat,” Volume 10 Nomor 2.
- Shafariani.F. 2011. Analisis Kawasan Andalan Sebagai Pusat Pertumbuhan di Provinsi Aceh. PPs.Unsyiah. Aceh
- Tarigan, R. 2004. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara
- Tutupoho, Ali. 2019. Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). Vol. XIII, No. 1, Mei 2019 Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi ISSN 1978-3612